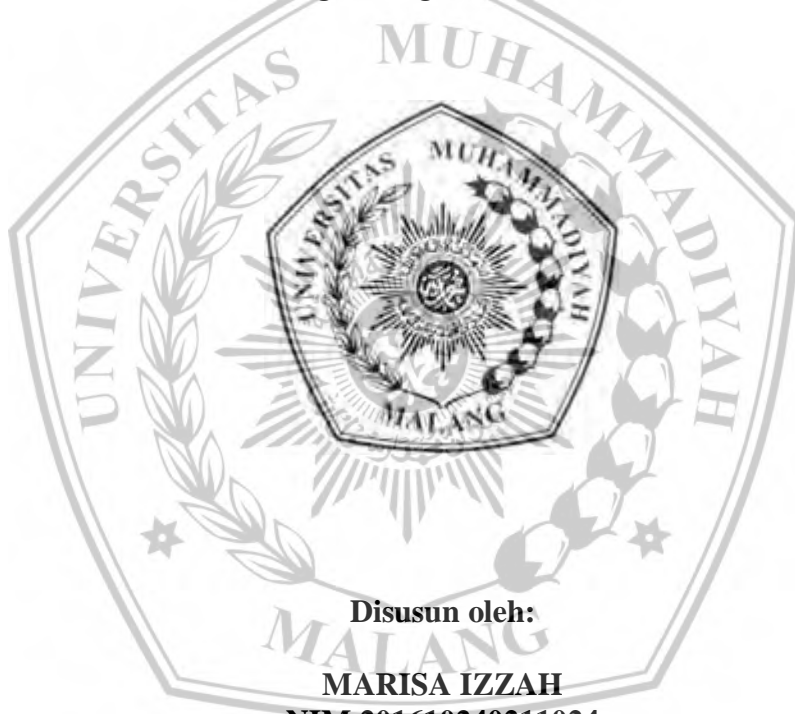


**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
MADRASAH DINIYAH DALAM MEMPERKUAT KARAKTER
SISWA SD DI BANGIL PASURUAN**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Kebijakan dan
Pengembangan Pendidikan



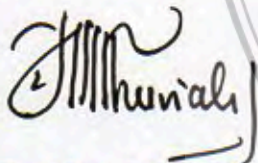
**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Juli 2018**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
MADRASAH DINIYAH DALAM MEMPERKUAT KARAKTER
SISWA SD DI BANGIL PASURUAN**

**MARISA IZZAH
201610240211024**

Telah disetujui
Pada hari/tanggal, Rabu/ 25 Juli 2018

Pembimbing Utama



Dr. Nurul Zuriyah

Pembimbing Pendamping



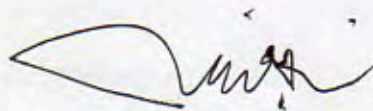
Dr. Sukarsono

Direktur
Program Pascasarjana



Akhsanul Fikriam Ph.D


Ketua Program Studi
Magister Kebijakan dan
Pengembangan Pendidikan



Dr. Agus Tinus

TESIS

MARISA IZZAH
201610240211024



Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Rabu/ **25 Juli 2018**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua / Penguji : Dr. Nurul Zuriah
Sekretaris / Penguji : Dr. Sukarsono
Penguji : Dr. Mohamad Syahri
Penguji : Dr. Agus Tinus

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **MARISA IZZAH**

Nim : **201610240211024**

Program Studi : **Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH DALAM MEMPERKUAT KARAKTER SISWA SD DI BANGIL PASURUAN**, adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Juli 2018

Yang Menyatakan,




MARISA IZZAH

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam Memperkuat Karakter Siswa SD di Bangil Pasuruan”** guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan program studi Kebijakan dan pengembangan pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan tesis ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Fauzan, M.Pd selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Akhsanul In'am, Ph.D selaku Direktur Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Dr. Agus Tinus, M.Pd selaku ketua program studi Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Dr. Nurul Zuriah, M.Si selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan, mengarahkan, serta memberikan motivasi untuk terselesaikannya tesis ini;
5. Dr. Sukarsono, M.Si selaku dosen Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, mengarahkan, serta memberikan motivasi untuk terselesaikannya tesis ini;
6. Bapak/Ibu Dosen Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penyusunan tesis ini;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dan Staf Bagian Pergurag Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan;
8. Kepala Kementrian Agama, serta Staf Bidang Pondok Pesantren Kabupaten Pasuruan;
9. Kepala Sekolah SDN Dermo 1, Kepala Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah, dan Kepala SDS Roudhotul Ulum Bangil;

10. Guru Agama SDN Dermo 1, Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah, dan SDS Roudhotul Ulum Bangil;
11. Kepala sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil yang telah memberikan ijin belajar serta memberikan dukungan dalam penyelesaian tesis ini;
12. Semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari kekurangan, kesalahan, dan kelemahan. Oleh karena itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, pemangku kebijakan pendidikan, para pemerhati pendidikan dan khususnya bagi penulis sendiri.



Malang, 25 Juli 2018

Penulis

ABSTRAK

Izzah, Marisa. (2018). *Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam Memperkuat Karakter siswa SD di Bangil Pasuruan*. Tesis. Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (1) Dr. Nurul Zuriah, M.Si; (2) Dr. Sukarsono, M.Si.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Wajib Belajar, Madrasah Diniyah, Karakter Siswa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Madrasah Diniyah dalam memperkuat karakter siswa SD di Bangil Pasuruan, faktor pendukung, penghambat, serta solusinya. Penelitian ini dilakukan pada Januari – April 2018 menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumen. Analisa data dengan menggunakan *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Uji keabsahan data dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Wajib Belajar Madrasah Diniyah pada sekolah dasar di Bangil dilakukan dengan mengarahkan siswa untuk mengikuti Madrasah Diniyah yang berada di sekitar tempat tinggal siswa, apabila sekolah tersebut tidak memiliki madrasah diniyah. Kegiatan belajar dan mengajar di Madrasah Diniyah dilakukan sekitar pukul 14.00 – 16.00 WIB. Faktor pendukung dari kebijakan ini adalah support dari pemerintahan Kabupaten Pasuruan berupa dana dan sosialisasi secara terus menerus di 24 Kecamatan se Kabupaten Pasuruan. Faktor penghambat kebijakan ini adalah sosialisasi tentang Kebijakan Wajib Belajar Madrasah Diniyah belum disosialisasikan secara maksimal sehingga di tahun pertama banyak sekolah dasar di Kabupaten Pasuruan tidak menerapkan wajib Madin ini. Beberapa sekolah dasar tidak memiliki dokumen PERBUP No 21 Tahun 2016 tentang Wajib Madin dan petunjuk teknis PERBUP tersebut. Di samping itu, banyak Madrasah Diniyah tidak memiliki izin pendirian dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan.

ABSTRACT

Izzah, Marisa. (2018). The Implementation of Madrasah Diniyah Compulsory Education Policy in Strengthening the Primary Student's Character in Bangil, Pasuruan. Thesis, Postgraduate Degree. Master of Education Policy and Development of University of Muhammadiyah Malang. Counselor: (1) Dr. Nurul Zuriah, M.si; (2) Dr. Sukarsono, M.Si.

Keywords: Policy Implementation, Compulsory Education, Madrasah Diniyah, Student's character.

This study aims to determine the form of implementation of compulsory education policies in improving the character of Madrasah Diniyah elementary school students in Bangil Pasuruan, supporting factors, inhibitors, and solutions. This research was conducted in January - April 2018 using qualitative method with descriptive approach. Data collection using interview techniques, observation, and documents. Data analysis using data reduction, display data, and conclusion drawing/ verification. Test data validity with triangulation. The results showed that the implementation of compulsory education of Madrasah Diniyah in elementary school in Bangil was done by directing the students to follow the Madrasah Diniyah located around the student residence, if the school does not have Madrasah Diniyah. Learning and teaching activities in Madrasah Diniyah done at around 14:00 to 16:00 pm. Supporting factors of this policy are supporting from the government of Pasuruan in the form of funds and socialization continuously in 24 sub-districts Pasuruan Regency. Inhibiting factors of this policy is the socialization of compulsory education policy Madrasah Diniyah not socialized to the maximum so that in the first year many elementary schools in Pasuruan not apply this mandatory madin. Some elementary schools do not have documents of PERBUP No. 21 of 2016 on Wajib Madin and technical guidelines of that policy. And many Madrasah Diniyah do not have permission of establishment from the Office of the Ministry of Religious Affairs Pasuruan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	
Halaman Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar	i
Abstrak	iii
Abstract	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar.....	viii
1. Pendahuluan	1
2. Kajian Pustaka	
2.1. Penelitian Terdahulu	4
2.2. Implementasi Kebijakan.....	5
2.2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	5
2.2.2. Implementasi Kebijakan Pendidikan.....	6
2.3. Wajib Belajar pendidikan Madrasah Diniyah	7
2.3.1. Isi Peraturan Bupati No 21 Tahun 2016	8
2.4. Karakter	9
2.5. Kerangka Penelitian	11
3. Metode Penelitian	
3.1. Pendekatan dan Rancangan Penelitian	12
3.2. Lokasi Penelitian	12
3.3. Subyek Penelitian.....	13
3.4. Instrumen Penelitian.....	13
3.5. Sumber dan Jenis Data	13
3.6. Teknik Pengumpulan Data	13
3.7. Teknik Analisis Data.....	14
3.8. Teknik uji Keabsahan Data	15

4. Hasil Penelitian

4.1. Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madin dalam Memperkuat Karakter Siswa SD di Bangil Pasuruan	16
4.2. Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madin dalam Memperkuat Karakter Siswa SD di Bangil	20
4.2.1 Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madin di SDN Dermo Bangil	20
4.2.2 Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madin di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil	22
4.2.3 Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madin di SDS Roudotul Ulum Bangil	24
4.3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madin dalam Memperkuat Karakter Siswa SD di Bangil Pasuruan.....	25
4.3.1 Faktor Pendukung	25
4.3.2 Faktor Penghambat	26
4.4 Solusi untuk Mengatasi Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Madin	28
5. Pembahasan	
5.1 Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madin dalam Memperkuat Karakter Siswa SD di Bangil Pasuruan	29
5.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madin dalam Memperkuat Karakter Siswa SD di Bangil Pasuruan	33
6. Kesimpulan	34
7. Saran.....	34

Rujukan

DAFTAR TABEL

Halaman

4.1. Penanaman nilai-nilai karakter pada pembelajaran di Madin.....	19
---	----



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Implementasi menurut Edward III	6
2. Kristalisasi Nilai Karakter	10
3. Kerangka Berfikir Penelitian	11



1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di setiap negara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi anak agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, berkepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Pendidikan yang berkualitas memegang peran kunci dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul (Waiganjo W, 2012; Omebe, 2014). Sementara SDM diperlukan sebagai penggerak proses pembangunan suatu Negara, semakin berkualitas SDM yang dimiliki oleh suatu Negara maka semakin cepat proses pembangunannya menjadi Negara yang memiliki masyarakat madani (Ridho & Zainal, 2010).

Kabupaten Pasuruan terkenal dengan sebutan “Kota Santri”, karena hampir 94% penduduknya beragama Islam sedangkan yang lainnya non muslim. Penduduk Kabupaten Pasuruan sangat kental menjalankan syariat Islam. Berdasarkan rekap data Departemen Agama Kota/Kabupaten Pasuruan, jumlah pesantren yang berdiri 4.4% dari jumlah pesantren di Jawa Timur. Hal ini membuktikan bahwa jumlah pesantren di Kabupaten Pasuruan termasuk tinggi dan mendukung label dari Kabupaten Pasuruan sebagai Kota santri (Abdillah, 2010).

Seiring perkembangan zaman, sebutan Kota santri mulai terkikis. Hal tersebut dikarenakan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para remaja, sehingga membuat gelisah masyarakat Pasuruan. Sebagaimana pernyataan dari Bupati Kabupaten Pasuruan yang kerab disapa Gus Irsyad, bahwa banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Pasuruan melibatkan pelajar yang sudah sangat memprihatinkan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pendidikan agama yang diperoleh para siswa, sehingga penanaman nilai-nilai keagamaan harus diutamakan (Radar Bromo, 2016). Atas keprihatinan tersebut, Bupati Pasuruan mengeluarkan PERBUP No 21 tahun 2016 tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah bagi siswa berumur 7 sampai 18 tahun.

Penetapan Peraturan Bupati No 21 tahun 2016 mengacu pada peraturan-peraturan sebelumnya yaitu PERDA Nomor 28 tahun 2002 tentang Tata Organisasi Dinas Pendidikan Bidang Perguruan yang Membidangi: MI, MTs, MA, Madin, dan Pondok Pesantren, PERBUP No 36 tahun 2007 tentang Baca Tulis Al Qur'an (BTQ) Bagi Peserta Didik yang Beragama Islam, serta PERDA Nomor 4 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan penetapan peraturan tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah pada jenjang sekolah dasar ini agar para pelajar dapat dibekali dengan ilmu agama lebih banyak, sehingga dapat meminimalisir perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan para pelajar di Kabupaten Pasuruan. Dalam kondisi masyarakat yang pendidikan moral dan nilainya melemah, maka peranan pendidikan di sekolah sangatlah dibutuhkan (Makmun, 2014). Penanaman nilai-nilai agama Islam di sekolah dan Madrasah Diniyah, diharapkan dapat mengisi dan menjadikan insan-insan agamis berwatak Al Qur'an seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW (Wasmawati, 2015).

Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Madrasah Diniyah adalah pioner lembaga pendidikan di Indonesia, karena Madrasah Diniyah ini merupakan cikal bakal pendidikan di Indonesia (Istiyani, 2017). Awalnya, Madrasah Diniyah hanya mengembangkan kurikulum keislaman saja, tetapi seiring waktu dan perkembangan zaman, Madrasah Diniyah telah memadukan pengembangan antara ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu teknologi dan pengetahuan umum (Nasir, 2015). Madrasah Diniyah juga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya sehingga mempunyai daya tarik yang besar untuk umat Islam (Amiruddin, 2011). Di tengah derasny arus informasi dan canggihnya teknologi, maka sangat perlu untuk tidak hanya mengoptimalkan pendidikan agama dan pembentukan karakter di sekolah tetapi juga didukung dengan peran Madrasah Diniyah (Syahr, 2016).

Madrasah Diniyah berbeda dengan sekolah formal madrasah, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah dalam waktu belajarnya. Waktu belajar Madrasah Diniyah di luar jam sekolah dan jumlah mata pelajarannya yang lebih sedikit yang dikhususkan hanya untuk pelajaran pelajaran Islam. Sedangkan sekolah keagamaan dalam bentuk formal yaitu Madrasah Ibtidaiyah,

Tsanawiyah maupun Aliyah memiliki cakupan mata pelajaran yang lebih luas karena tidak hanya mengajarkan tentang studi-studi Islam sebagaimana di Madrasah Diniyah tetapi juga memberikan pelajaran umum sebagaimana sekolah formal biasa, seperti adanya pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) dan bahasa di kurikulumnya. (Haningsih, 2008; Syahr, 2016).

Program Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah yang digulirkan oleh Bupati Kabupaten Pasuruan ini sesuai dengan kebijakan yang dipilih oleh pemerintah (Kementrian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan) dalam menggalakkan pendidikan karakter dengan merubah orientasi pendidikan dengan penguatan pendidikan karakter (Supa'at, 2014). Pendidikan karakter yang awalnya terdiri dari 18 karakter mengerucut menjadi 5 karakter yaitu Religious, Nasional, Mandiri, Gotong Royong dan Integritas. Kelima katrakter tersebut harus dimiliki siswa sehingga dapat menjadikan siswa berkarakter. Pada dasarnya karakter siswa terbentuk bukan dari apa yang diberikan guru di sekolah tetapi lebih pada praktek yang diberikan oleh guru-guru yang terdiri dari dua bagian yaitu secara konseptual dan kontekstual. Pembiasaan dan pemberian contoh perilaku baik, dengan sendirinya akan tertanam dalam diri siswa dan menjadi suatu pembiasaan diri.

The content of educational characters not simultaneously carried out by teachers. More characters have been discussed in this study based on what has been practiced for madrassa teachers, which consists of two parts, either conceptually and contextually. Conceptually found character religion, care, and honesty. While contextually found character construction of social relations, discipline and politeness (Abu et al., 2015).

Dari fenomena yang ada di Kabupaten Pasuruan, peneliti tertarik untuk meneliti penerapan kebijakan pendidikan Madrasah Diniyah ini pada level pendidikan utamanya di tingkat sekolah dasar di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Adapun judul dari penelitian ini adalah *“Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah Dalam Memperkuat Karakter Siswa SD di Bangil Pasuruan.”*

Berdasarkan paparan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam memperkuat karakter siswa SD di Bangil Pasuruan. 2) Apakah faktor pendukung dan penghambat pada Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam memperkuat

karakter siswa SD di Bangil Pasuruan. 3) Bagaimana solusi untuk mengatasi faktor penghambat pada Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam memperkuat karakter siswa SD di Bangil Pasuruan.

2. Kajian Pustaka

2.1 Penelitian Terdahulu

Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah pada sekolah non pesantren telah dilakukan oleh para peneliti, meskipun dengan fokus penelitian yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu yang mengangkat persoalan implementasi kebijakan Madrasah Diniyah antar lain sebagai berikut:

a. Sultan et al., (2016) yang berjudul *Implementation of Islamic Education in Serang City* (Pelaksanaan Pendidikan Madrasah Diniyah di Kota Serang). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kebijakan wajib belajar Madrasah Diniyah diperuntukkan bagi setiap warga negara untuk menempuh jenjang SMP/MTs atas tanggungjawab pemerintah Kota dan DPRD Kota Serang menjadikan pendidikan diniyah sebagai sarana utama untuk pemberdayaan dan pembentukan kepribadian unggul masyarakat Serang baik secara struktural atau fungsional. Dan setiap warga belajar yang telah berusia 6 - 12 tahun, dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs, harus dibuktikan dengan kepemilikan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Diniyah dalam bentuk syahadah atau sertifikat diniyah.

b. Acetylena, (2013) yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan karakter di Perguruan Taman siswa Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan karakter di SD Taman Siswa berjalan dengan baik meskipun ada beberapa kendala. Kendala tersebut adalah kurang profesionalisme dan jiwa “Among” guru, adanya pengaruh negatif globalisasi pada siswa serta kurangnya peran orang tua dan masyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan strategi yaitu meningkatkan profesionalisme guru, melaksanakan metode budi pekerti dengan metode ngerti, ngroso, dan ngelakoni. Memperkuat peran komite melalui peran serta orang tua dan masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penetapan kebijakan Madrasah Diniyah ini berawal dari ingin mengekskiskan Madrasah Diniyah, memberikan tambahan ilmu agama Islam pada siswa sekolah

dasar agar dapat menguasai ilmu agama Islam secara kaffah sehingga karakter siswa dapat teratasi. Kebijakan ini ditujukan bagi siswa sekolah dasar yang akan melanjutkan ke jenjang SMP/MTs. Karena salah satu syarat masuk SMP/MTs Negeri harus menunjukkan syahadah Madrasah Diniyah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini ingin mengetahui implementasi kebijakan pendidikan wajib madrasah diniyah di sekolah dasar. Yang mencakup kegiatan sosialisasi kebijakan dan proses belajar mengajar, serta hambatan dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya hanya ingin mengkaji kebijakan apakah sesuai dengan pendidikan Islam.

2.2 Implementasi Kebijakan

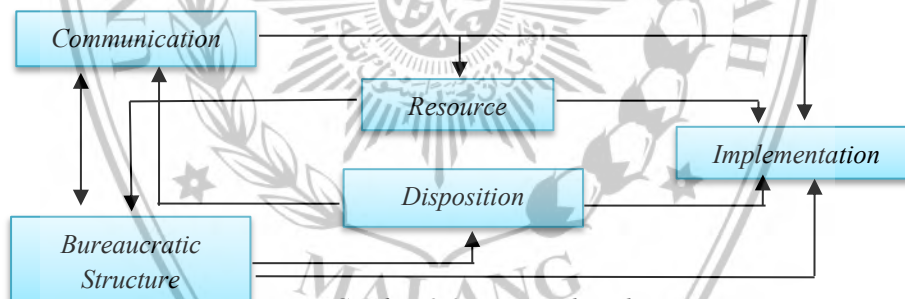
2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Sa'ud, S., & Makmun (2006) menyatakan: "Kekuasaan kebijakan mencakup setiap hukum yang memperhatikan kesejahteraan semua orang dalam negaranya atau setiap individu di dalamnya, apakah berkaitan dengan hak-hak atau kewajibannya, apakah penghargaan sebagai individu atau warga negara, hak-hak individu atau kekayaan seluruh orang dalam negaranya atau setiap individu di dalamnya. Kekuasaan kebijakan termasuk dalam kekuasaan negara untuk membatasi hak-hak individu atas kepentingan kelompok sosial karena mempertimbangkan kesehatan masyarakat, keamanan, kesejahteraan atau moral." Pernyataan tersebut menggambarkan peran negara atau pemerintah yang memiliki wewenang menentukan kebijakan dalam bentuk perundang-undangan kebijakan, negara bebas merumuskan dan menjalankan kebijakannya sendiri, termasuk bidang pendidikan.

Kebijakan bidang pendidikan yang memenuhi langit harapan masyarakat Indonesia dengan terpenuhinya pendidikan yang unggul bagi seluruh lapisan masyarakat hingga simpul paling bawah. Kebijakan pendidikan bukan tidak mungkin menjadi bagian kebijakan publik dalam arti yang sesungguhnya, yakni melibatkan peran serta rakyat dalam menentukan cita-cita sosial (*social ideals*) secara kolektif dalam menentukan kebijakan pendidikan di negara mereka sendiri (Solichin, 2015).

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Dunn, 2003). Istilah implementasi dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Berbeda dengan Dunn, Van dan Horn (dalam Wibawa, 1994) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Edward III mendefinisikan implementasi sebagai tahapan dalam proses kebijakan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijakan dan hasil atau konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan itu (*output, outcome*). Melalui model yang dikembangkan, Edward III mengemukakan ada 4 (empat) faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Apa yang menjadi kendala pokok bagi suksesnya suatu implementasi kebijakan, dan menemukan 4 (empat) variabel tersebut setelah mengkaji beberapa pendekatan yang dilakukan penulis lain, yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi (Juliarta, 2009). Keempat hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1.: Teori Edward III
Sumber: (Juliarta: 2009)

Menurut Paul A, (1986), terdapat dua model yang terpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yaitu model *top down* dan model *button up*. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model proses, dan model *incremental* dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model *top down*. Sedangkan gambaran model *button up* dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan.

2.2.2 Implementasi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan turunan dari suatu sistem perpolitikan. Sehingga dalam memahami wacana kebijakan pendidikan tidak terlepas dari kajian

sistem perpolitikan yang berlaku dalam suatu Negara. Menurut (Tilaar, 2012) politik merupakan sebuah pemahaman tentang kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu diselenggarakan. Oleh karena itu, kedudukan politik sebagai sebuah konsep dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan yang ada merupakan turunan dari kebijakan publik. Yaitu kebijakan yang dibuat oleh Negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan demikian kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik atau dalam kebijakan publik (Tilaar, 2012).

Kebijakan (*policy*) seringkali dicampur adukkan dengan kebijaksanaan (*wisdom*). Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal. Tentunya suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia. Namun, akal manusia merupakan unsur yang dominan di dalam mengambil keputusan dari berbagai pilihan dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik di bidang pendidikan. Hal tersebut seperti dikemukakan oleh Mark, John, and Anne dalam (Tilaar, 2012) bahwa kebijakan pendidikan merupakan kunci keunggulan, bahkan eksistensi bagi Negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Kebijakan dalam pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah mencakup banyak aspek, antara lain adalah aspek kurikulum, pedagogik dan penilaian, tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana (Fattah, 2012). Dengan demikian, kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan Negara di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan Negara secara keseluruhan (Tilaar, 2012). Terkait dengan pernyataan tersebut, maka dalam implementasi kebijakan pendidikan idealnya harus mengakomodir kepentingan publik bukan kepentingan kelompok atau perorangan. Implementasi kebijakan itu pada prinsipnya adalah cara atau langkah yang dilakukan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Sirajuddin, 2014).

2.3 Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah

Pendidikan Wajib Belajar Madrasah Diniyah wajib diikuti oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan, utamanya yang berusia sekolah 7 sampai 18 tahun, untuk

menambah pendidikan agama yang kurang diperoleh pada sekolah formal. Madrasah Diniyah adalah salah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal (Maskur, 2017). Madrasah Diniyah menerapkan jenjang pendidikan yaitu: (1). Diniyah Awaliyah yaitu Madrasah Diniyah tingkat dasar, masa belajar selama empat tahun dan jumlah jam belajar 18 jam pelajaran seminggu. (2). Diniyah Wustho yaitu Madrasah Diniyah dalam menyelenggarakan pendidikan Islam tingkat menengah pertama sebagai pengembangan pengetahuan diperoleh pada Madrasah Diniyah Awaliyah, masa belajar selama dua tahun dengan jumlah jam belajar 18 jam pelajaran. (3). Diniyah Ulya yaitu Madrasah Diniyah tingkat menengah atas dengan melanjutkan dan mengembangkan pendidikan Madrasah Diniyah Wustho, masa belajar dua tahun dengan jumlah jam belajar 18 jam per minggu (Departemen Agama RI, 2003).

Kata "Madrasah" dalam bahasa Arab termasuk bentuk kata keterangan tempat (*zharaf makan*) dari akar kata "*darasa*". Secara harfiah "Madrasah" diartikan sebagai tempat belajar para pelajar, atau tempat untuk memberikan pelajaran (Kosim, 2007). Dalam perkembangannya Madrasah Islamiyah berdiri jauh sebelum SD/SMP/SMA/SMK, atau perguruan tinggi. Sebab madrasah adalah salah satu sarana strategis bagi kyai/ustadz dengan masyarakat dalam rangka menyampaikan aspek-aspek ajaran Islam (Akhirudin, 2015).

2.3.1 Isi Peraturan Bupati No 21 Tahun 2016

Isi Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2016 adalah penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dan Takhassus Diniyah di Kabupaten Pasuruan berfungsi untuk membentuk generasi Islam yang dapat mendalami ilmu-ilmu agama Islam dan mengamalkan secara baik dan benar mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan ajaran-ajaran agama Islam secara baik dan benar. Sedangkan tujuan dari PERBUP ini adalah: 1) Membentuk peserta didik untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam. 2). Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami ilmu yang mencakup tentang Qur'an, Hadist, Tauhid, Akhlak, Fiqih, Bahasa Arab, dan Tarikh Islam. 3). Membangun

mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, dan bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggungjawab.

Penyelenggara pendidikan dalam hal ini adalah sekolah/madrasah yang merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal atau non formal dalam binaan Dinas pendidikan atau Kementerian Agama. Penyelenggara dari pendidikan Madrasah Diniyah ini adalah lembaga berbasis masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan agama Islam, dengan memperhatikan keseimbangan antara pendidikan keagamaan, pendidikan umum, dan keterampilan.

Pembelajaran pada Madrasah Diniyah ini merupakan pembelajaran yang diselenggarakan oleh lembaga disesuaikan dengan jadwal Madrasah Diniyah yang bersangkutan, diterapkan model pembelajaran pesantren yang mengutamakan teladan atau contoh pada siswa. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan. Evaluasi yang digunakan pada Madrasah Diniyah ini yaitu monitoring yang dilaksanakan oleh Bidang Perguruan Agama Dinas Pendidikan.

Kurikulum yang digunakan pada pendidikan Madrasah Diniyah ini dibuat oleh setiap satuan pendidikan dengan mengacu pada standar minimal kurikulum Madrasah Diniyah Kabupaten Pasuruan yang telah ditetapkan oleh team pengembang kurikulum diniyah. Dalam pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah disesuaikan dengan madrasah itu sendiri, disesuaikan dengan landasan filosofi pendiriannya (Salahuddin, 2013).

2.4 Karakter

Secara harfiah karakter artinya kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama, atau reputasi, (Hornby and parnwell dalam Aziz, 2011). Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia, “Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain; tabiat; watak.” (Aziz, 2011). Esensi karakter sesungguhnya identik dengan akhlak, karena karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka hubungan dengan Tuhan, dengan dirinya, dengan sesama manusia, maupun lingkungannya. Terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan,

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat (Supa'at, 2014).

Pada abad 21 ini sangat dibutuhkan siswa yang memiliki karakter kuat dan berkualitas untuk membangun bangsa. Karena itu, dibutuhkan sekolah yang dapat menggabung pendidikan moral dengan pendidikan umum yang dapat membentuk pribadi yang menguasai IMTAQ dan IPTEK (Lubis, 2015). Pendidikan karakter dalam lintas sejarah pendidikan Indonesia telah dicanangkan sejak tahun 1947 bersamaan dengan pemberlakuan sistem kurikulum dalam pendidikan di Indonesia yang populer dengan istilah *Teaching plan* artinya rencana pengajaran. Sejak saat itu visi dan misi pendidikan berbasis pada pembentukan karakter mulai dikembangkan (Kaimuddin, 2014).

Pemerintah RI melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yaitu Program pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Dalam Program PPK ini nilai-nilai pendidikan karakter yang awalnya ada 18 nilai-nilai karakter yang harus dikembangkan kemudian dikristalisasi menjadi 5 nilai karakter yang harus dikembangkan meliputi: Religius, Nasionalis, Mandiri, Gotong Royong, dan Integritas.



Gambar 2.2

Kristalisasi Nilai Karakter

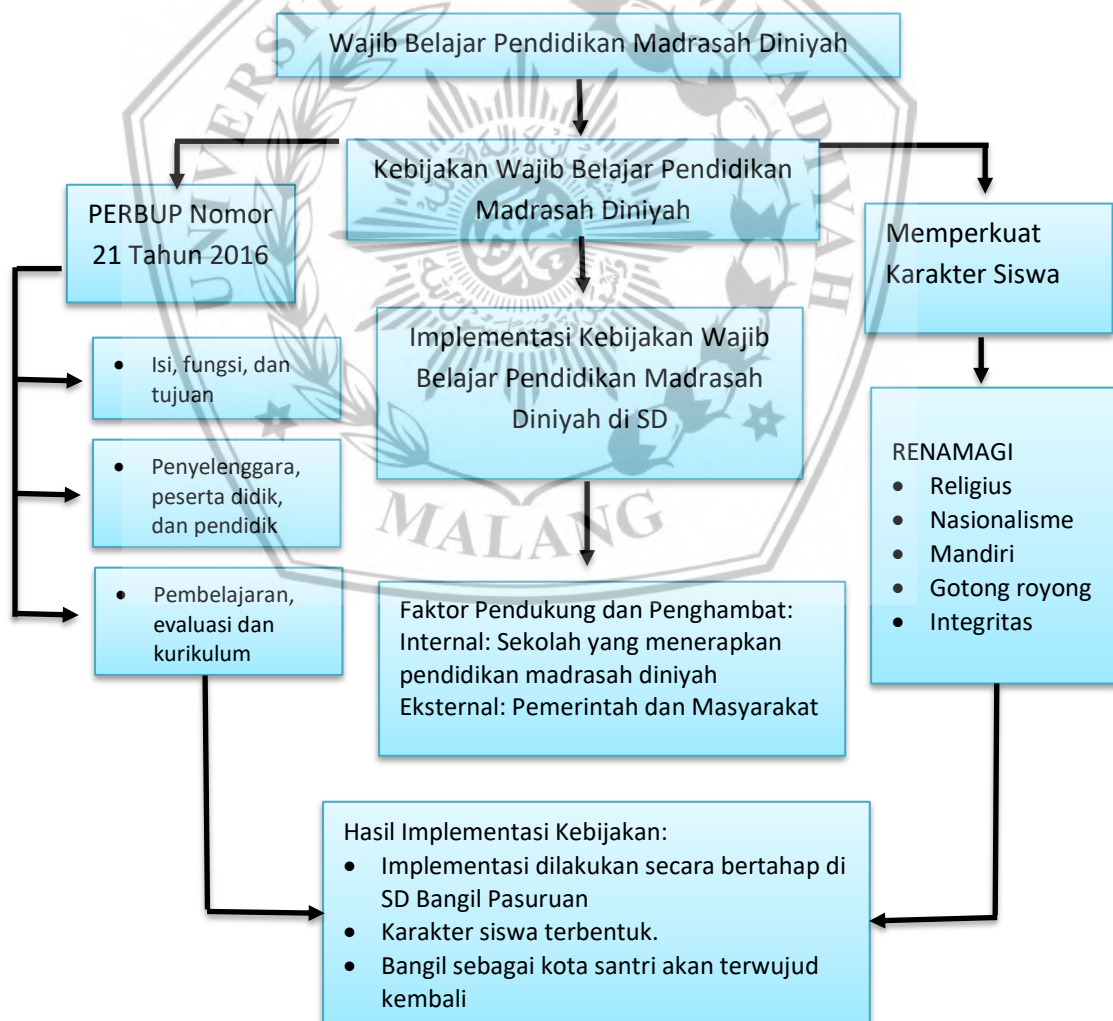
(Sumber: Modul PPK Kementrian Pendidikan dan kebudayaan RI: 2016)

Pendidikan karakter yang diterapkan pada Madrasah Diniyah mengacu pada pendidikan pesantren yaitu menanamkan nilai-nilai pendidikan agama melalui tauladan yang diberikan secara langsung pada siswa. Para ustad/ustadzah memberikan bimbingan dengan pendekatan kontekstual, menanamkan nilai-nilai agama sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mampu

merubah peradaban jahiliyah di Jazirah Arab menjadi peradaban yang sangat manusiawi. Penanaman nilai nilai karakter pada Madrasah Diniyah dengan basis pendidikan pesantren sangat sesuai dengan nilai-nilai pendidikan karakter yang digagas Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Lima unsur karakter semuanya masuk di dalam pendidikan karakter berbasis pesantren.

2.5 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian sangat penting dalam sebuah karya ilmiah, terutama mengantar dan memudahkan para pembaca untuk menelaah, mengkaji alur penulisan ke mana arah tujuannya. Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam menguatkan karakter siswa sekolah dasar di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Untuk lebih jelasnya kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagaimana berikut:



Gambar 2.3: Kerangka Berfikir Penelitian

3. Metode Penelitian

3.1 Pendekatan dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam perselisihannya (Moleong, 2004). Dalam penelitian ini mencari esensi dari ditetapkan Kebijakan wajib Belajar Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan, peneliti terlebih dahulu memahami kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 secara mendalam. Selanjutnya peneliti mengamati bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut dalam memperkuat karakter siswa di sekolah dasar.

Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan studi multi situs, yaitu berusaha mendeskripsikan suatu latar, objek, atau peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam. Studi kasus/situs adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat (Rianto, 2001). Penelitian ini akan menghasilkan informasi yang detail yang mungkin tidak bisa didapat pada penelitian yang lain.

Karakteristik utama studi multi situs yaitu apabila peneliti meneliti dua atau lebih subjek, latar, atau tempat penyimpanan data. Kasus yang diteliti dalam situs penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Madrasah Diniyah di tiga sekolah dasar, yaitu di sekolah negeri dan dua sekolah swasta di Kecamatan Bangil. Tiga sekolah ini memiliki perbedaan dalam beban jam pendidikan Agama Islam. Di sekolah negeri jam belajar agamanya hanya 2 jam dalam se minggu. Sedangkan di sekolah swasta Islam mengajarkan 5 jam atau lebih dalam se minggu. Dari perbedaan jam ini peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan wajib belajar Madrasah Diniyah dalam memperkuat karakter siswa di masing-masing sekolah tersebut.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah SDN Dermo 1 Bangil, Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil, dan SDS Roudhotul Ulum (RDU) Bangil. Ke tiga sekolah tersebut terletak di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Peneliti mengambil ke tiga lokasi karena sifat peneliti adalah naturalistik. Peneliti naturalistik adalah

peneliti yang menghindari pengambilan sample secara acak, untuk menekan kemungkinan munculnya kasus menyimpang, dan pengambilan acak peran sejumlah variable menjadi moderat, sehingga karakteristik ekstrim tidak muncul (Guba, 1985).

3.3 Subyek Penelitian

Pemilihan subjek/informan penelitian dimaksud untuk memperoleh data yang akurat. Subjek dari penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Kepala Kementrian Agama Kabupaten Pasuruan, kepala sekolah, guru agama, dan walimurid dari SDN Dermo 1, Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah, dan SDS RDU Bangil Pasuruan.

3.4 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Peneliti berperan sebagai pengumpul data penelitian dengan beberapa alat pendukung seperti buku, dokumen, pedoman wawancara, dll. Kisi-kisi instrumen penelitian dibuat untuk memudahkan peneliti membuat pedoman wawancara.

3.5 Sumber dan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dalam bentuk kata-kata atau ucapan lisan (verbal) dan perilaku dari subjek (informan) berkaitan dengan implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah dalam hal ini adalah pelaksana kebijakan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, foto-foto, dan benda-benda yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer. Karakter data sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan, rekaman-rekaman, gambar atau foto yang berhubungan dengan proses Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam memperkuat karakter siswa di sekolah dasar Kecamatan Bangil.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, angket dan studi documenter (Sukmadinata, 2015). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik wawancara ini dilakukan dengan Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Pasuruan, Kepala Kementrian Agama Kabupaten Pasuruan, Kepala

Sekolah SDN Dermo 1 Bangil, Kepala Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil, Kepala SDS RDU Bangil, Guru Agama SDN Dermo 1, Guru Agama Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil, Guru Agama SDS RDU Bangil, dan wali murid. Adapun yang dibutuhkan dari wawancara ini adalah menggali data tentang Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam memperkuat karakter siswa SD di Bangil Pasuruan.

Teknik observasi ini dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui kegiatan belajar mengajar di Madrasah Diniyah yang dilakukan oleh anak-anak dan guru dalam hubungannya dengan sekolah formal yang diikuti siswa, kegiatan kepala sekolah serta wali murid dalam implementasi wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah.

Teknik dokumentasi dilakukan oleh peneliti untuk menemukan bukti fisik yang disampaikan informan saat diwawancarai. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dokumen Kebijakan Bupati yang tertuang dalam PERBUP No 21 tahun 2016, sosialisasi Program Kebijakan Wajib Belajar Madrasah Diniyah, petunjuk teknis Program Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah, raport dan ijasah ISMUBA, raport khusus SDS RDU Bangil untuk menguatkan implementasi kebijakan tersebut.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa dalam model Miles and Huberman dalam (Sugiono, 2015) menyampaikan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intruktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sampai jenuh. Analisis data menggunakan *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Dalam mereduksi data peneliti berpedoman pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu: a) Mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam menguatkan karakter siswa SD di Bangil Pasuruan. b). Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pada Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam menguatkan karakter siswa SD di Bangil Pasuruan. c). Mendeskripsikan solusi untuk mengatasi faktor penghambat pada Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Madrasah Diniyah dalam menguatkan karakter siswa SD di Bangil Pasuruan.

Penyajian data, setelah dilakukan analisis dan pengecekan ulang data disajikan menggunakan uraian deskriptif dan tabel mengenai Implementasi

Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam memperkuat karakter siswa SD di Bangil. Kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan yang diambil merupakan hasil proses analisis yang memberikan deskripsi Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam memperkuat karakter siswa SD di Bangil.

3.8 Teknik Uji Keabsahan Data

Uji pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dengan demikian terdapat berbagai triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiono, 2015), Denzim (dalam Moleong, 2004) membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data/metode dengan memintakan kesepakatan (member check). Untuk mendapatkan data yang kredibel tentang peran pemangku kepentingan dalam Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam memperkuat karakter siswa SD di Bangil Pasuruan, maka wawancara dilakukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Kepala Kementrian Agama Kabupaten Pasuruan, Kepala SDN Dermo 1 Bangil, Kepala Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil, Kepala SDS RDU Bangil, dan guru agama pada ketiga sekolah tersebut. Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi sumber pada kepala Dinas pendidikan Kabupaten Pasuruan, kepala Kementrian agama, kepala sekolah , dan guru agama SDN Dermo 1, Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil, dan SD RDU Bangil. Data tentang sosialisai dan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Wajib Madin dilakukan triangulasi metode dan sumber.

4. Hasil Penelitian

Deskripsi dari hasil penelitian Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Madrasah Diniyah dalam Menguatkan Karakter Siswa SD di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut.

4.1 Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam Memperkuat Karakter Siswa SD di Bangil Pasuruan

Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah mulai diterapkan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2016. Kebijakan ini dibuat berdasarkan misi Bupati Pasuruan yaitu mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berberbasis sekolah formal dan pondok pesantren. Selain itu, keresahan sebagian besar masyarakat Kabupaten Pasuruan khususnya Bupati Pasuruan atas kemerosotan moral para remaja yang sudah menyimpang dari ajaran Islam juga menjadi salah satu acuan ditetapkannya kebijakan ini. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Bapak Iswahyudi, M.Pd. dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

“...Latar belakang sampai wajib Madin ini yang pertama dengan maraknya lunturnya andap ashor, sopan santun, tata Krama, budi pekerti, dan iman taqwa akhlak itu sangat dikhawatirkan. Sehingga pembelajaran di sekolah umum itu memang agama agak terbatas sehingga difokuskan pada Madrasah Diniyah, meskipun kita punya BTQ...” (W/KDP/Dinas Pendidikan Kab. Pas/16 Maret 2018).

Hal ini diperkuat oleh data yang lain yang berasal dari wawancara Kepala Kementrian Agama Bapak Dr. Asadul Anam, M.PdI. sebagai berikut:

“....Ini adalah alternatif untuk mengatasi perilaku anak, dan ini sangat positif...” (W/KKA/Kemenag Kab.Pas/13 Maret 2018).

Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah secara umum bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan ajaran-ajaran agama Islam secara baik dan benar. Sedangkan secara khusus, mencakup beberapa hal yaitu: membentuk peserta didik untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami ilmu yang mencakup tentang Qur'an, Hadits, tauhid, Akhlak, Fiqih, Bahasa Arab, Tarikh Islam, dan membangun sikap mental peserta didik untuk

bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab.

Pendidikan karakter sangat diperlukan untuk mengatasi krisis moral remaja di Kabupaten Pasuruan akan terpenuhi dalam kebijakan ini. Ketika para pelajar di jenjang SD khususnya pada SD Negeri yang hanya mendapatkan 3-4 jam pelajaran agama, maka pada madrasah diniyah inilah kebutuhan ilmu agama akan terpenuhi. Seperti yang disampaikan oleh Guru Agama SD Dermo 1 Bangil Pasuruan:

“...karena kami kan jamnya sedikit. 1 minggu sekali 4 jam pelajaran untuk yang kurikulum 13 4 jam pelajaran dan KTSP 3 jam pelajaran. Alhamdulillah jadi anak anak sudah lebih banyak memahami materi keagamaan karena dari Madin itu kan sudah didukung dari situ...”
(W/GA/SDDermo 1 Bangil/31 Maret 2018).

Hal yang sama pula disampaikan oleh guru agama SD Roudotul Ulum Bangil:

“...pondasi, pondasi seseorang itu diukur dari keagamaan, seperti Nabi Muhammad dulu kan diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalau sudah akhlaknya baik, kecerdasan akan muncul,...di samping untuk mengurangi kenakalan,...minimnya pendidikan keagamaan, mereka kurang diarahkan.”
(W/GA/SDRDU Bangil/26 Februari 2018).

Dengan penetapan kebijakan ini, diharapkan dapat mengatasi kemerosotan moral para remaja di Kabupaten Pasuruan. Karena fungsi dari Wajib Belajar Madrasah Diniyah adalah mendalami ilmu-ilmu agama Islam untuk memahami dan mengamalkan secara baik dan benar. Sehingga karakter siswa yang baik dapat terpupuk.

Agar kebijakan Bupati Kabupaten Pasuruan ini dapat berjalan dengan lancar, dapat menumbuhkan persepsi dan pemahaman yang sama sehingga pada tataran pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan, maka pemerintah Kabupaten Pasuruan melakukan sosialisasi di 24 Kecamatan se Kabupaten Pasuruan. Sosialisasi Kebijakan Bupati yang tertuang dalam PERBUP No 21 Tahun 2016 ini dilakukan secara serentak di bulan Maret sampai April 2017 dengan membagi dalam bentuk Tim Wilayah. Sasaran dari sosialisasi ini adalah kepada 24 kepala desa yang ada di Kecamatan se Kabupaten Pasuruan, K3S SD 24 Kecamatan, Kepala SMP se Kabupaten Pasuruan, dan perwakilan dari Ka. Madin se Kabupaten Pasuruan. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan tentang teknis dari Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dalam lampiran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala

Kementrian Agama Kabupaten Pasuruan, Bapak Dr. Asadul Anam, M.PdI. dalam wawancaranya:

“....ada kegiatan sosialisasi tahun kemarin 2017 bahwa masyarakat harus tahu ada kebijakan yang diikuti oleh masyarakat dan perlu dijalankan, per kecamatan itu. Ada petugas khusus yang diminta untuk menyampaikan itu...” (W/KKA/ Kemenag Kab. Pas/13 Maret 2018).

Hasil observasi dan studi dokumen ditemukan dokumen panduan sosialisasi Program wajib Madrasah Diniyah oleh Pemerintahan Kabupaten Pasuruan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kemenag Kabupaten Pasuruan. (D1/PSPWBMD) (Terlampir).

Hal tersebut di atas juga diperkuat oleh pernyataan dari Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Pasuruan:

“...Sosialisasi Madin itu sudah dilaksanakan. Di situ ada team ya, teamnya itu dari Kemenag, dari Dinas, dari Dewan Pendidikan, dari Ma’arif, dan dari masyarakat pesantren. Dan itu sudah dilakukan sosialisasi melalui kecamatan, melalui desa, dengan bergiliran. Sekarang sudah hampir lanchlah artinya sudah fahamlah masyarakat tentang wajib Madin, tinggal bagaimana kita meningkatkan kualitasnya, efektivitas kegiatan di lapangan itu ajeg apa tidak...” (W/KDP/Dinas Pendidikan Kab.Pas/16 Maret 2018).

Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan, menfokuskan sasaran pada peserta didik yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun dan atau sedang menempuh jenjang Pendidikan Dasar Formal (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA). Adapun jenjang pendidikan pada madrasah diniyah ini adalah: 1). Madrasah Diniyah Awaliyah yaitu satuan pendidikan keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar dan ditempuh sekurang-kurangnya 4 tahun. 2). Madrasah Diniyah Wustho, yaitu satuan pendidikan keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat lanjutan yang ditempuh sekurang-kurangnya 2 tahun. 3). Madrasah Diniyah Ulya yaitu satuan pendidikan keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat atas yang ditempuh sekurang-kurangnya 2 tahun. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Kemenag Kabupaten Pasuruan, Bapak Dr. Asadul Anam, M.PdI., dalam wawancaranya:

“Sasaran dari kebijakan wajib belajar pendidikan madrasah diniyah ini adalah para pelajar yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun dengan jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, atau pendidikan selain jalur pesantren. Dengan kriteria pendidikannya yaitu untuk tingkat dasar adalah awaliyah kemudian wustho dan ulya.” (W/KK/Kemenag Kab. Pas./13 Maret 2018).

Dalam penelitian sebelumnya juga menyebutkan bahwa madrasah diniyah awaliyah (MDA) merupakan jenjang pendidikan setingkat SD/MI yang diperuntukkan bagi siswa sekolah dasar dan seterusnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agaman dan keagamaan. Halim (2008) mempertegas perhatian pemerintah yang semakin besar terhadap pendidikan madrasah dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang pemerintah daerah yang lebih populer dengan sebutan otonomi daerah. Undang-Undang tersebut menjadi tonggak baru munculnya ruang lebih luas bagi daerah untuk menata potensi yang dimiiki, termasuk pembinaan madrasah sebagai bagian dari pendidikan nasional.

Penguatan karakter dalam pendidikan di Madrasah Diniyah ini dapat terlihat pada pembiasaan yang diberikan guru pada siswa dalam pembelajaran. Siswa madin selalu diajarkan untuk berbuat jujur, sopan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan agama, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadzah Habibah pada saat wawancara, sebagai berikut:

“...dalam membentuk karakter anak agar tetap dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya selain menjelaskan materi-materi yang ada, saya juga berusaha untuk mengajarkan anak-anak agar terbiasa melakukan hal-hal yang positif...sholat lima waktu wajib dilakukan tepat waktu”(O/GM/15 April 2018).

Hal senada disampaikan oleh ustadzah Ria, guru di TPQ/Madin Nurul Fityan Dermo Bangil, sebagai berikut:

“Memberikan pengajaran agama di Madrasah Diniyah ini dengan hati, maksudnya anak-anak diarahkan pada hal-hal yang baik-baik, seperti selalu berkata jujur, menghormati yang lebih tua, oh ya dan juga menghargai sesama teman. ...(O/GM/ 15 April 2018).

Tabel 4.1 Penanaman nilai-nilai karakter pada pembelajaran di Madin

Nama Sekolah		
SDN Dermo I	SD Kreatif Muhammadiyah	SDS RDU
Davina (TPQ/Madin Nurul Fityan Dermo)	Adam (TPQ/Madin An Nur Pogar)	Syar Khizbaini (TPQ/Madin Nurul Hidayah Pandean)
Nilai PAI baik, lebih tinggi dari teman sekelas	Nilai PAI baik, lebih tinggi dari teman sekelas	Nilai PAI baik, lebih tinggi dari teman sekelas
Pembiasaan di Madin dengan sholat 5 waktu tepat waktu, dhuha, berkata jujur,	Pembiasaan di Madin dengan orang yang lebih tua sopan santun, menjaga sikap, saling	Pembiasaan di Madin dengan membaca Alqur'an, sholat dhuha, puasa sunnah.

dan menghormati yang lebih tua	menghargai satu dengan yang lain.	Dengan teman dan orang yang lebih tua harus menghargai.
Davina anak yang sopan, jujur serta peduli dengan teman. Mudah bergaul. Berprestasi juga di bidang baca puisi.	Adam anak yang baik, penurut, tidak pernah bertengkar dengan teman, termasuk juara olimpiade Matematika tingkat Kabupaten Pasuruan, Juara kelas dari kelas 1-6.	Syar adalah anak yang supel, sopan, suka menolong teman, hormat dengan guru, disiplin masuk sekolah. Termasuk 5 besar di kelas.

Hasil observasi dan studi dokumen ditemukan dokumen Raport yang berisikan nilai mata pelajaran agama siswa di SDN Dermo I, SD Kreatif Muhammadiyah, dan SD Roudotul Ulum dengan nilai lebih tinggi dibanding siswa yang lain. (D2/Raportsekolah/15 April 2018). (Terlampir)

4.2. Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam Memperkuat Karakter Siswa SD di Bangil Pasuruan

Pelaksanaan Kebijakan wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah ini sudah dimulai pada tahun pelajaran 2016/2017 di setiap sekolah SD/MI non pendidikan pesantren. Pada sekolah formal, pelaksanaan madrasah diniyah ini diselenggarakan pada Madrasah Diniyah yang lokasinya berada di sekitar tempat tinggal peserta didik yang telah terdaftar di Kantor Kementrian Agama. Jika di sekitar satuan pendidikan formal atau sekitar lokasi tempat tinggal siswa belum ada madrasah diniyah, maka segera di daerah tersebut diselenggarakan madin.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung pelaksanaan Kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah pada 3 sekolah, yaitu SDN Dermo 1 Bangil, Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil, dan SDS Roudotul Ulum Bangil Pasuruan pada bulan Januari – April 2018 dan hasilnya sebagai berikut:

4.2.1 Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah di SDN Dermo 1 Bangil.

Sekolah Dasar Negeri Dermo 1 Bangil berlokasi di jalan Nanas No 1 Desa Lumpang Bolong Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil. Sekolah ini adalah salah satu sekolah favorit di Kecamatan Bangil yang mempunyai 420 siswa. Dan juga merupakan sekolah Adiwiyata di Kecamatan Bangil dengan beberapa prestasi yang membanggakan, diantaranya juara II lomba Yel-yel Adiwiyatapada tahun 2018 ini di Kabupaten Pasuruan, Juara II Tiwisada tingkat Kecamatan Bangil, dan juara III Karnaval produk daur ulang tingkat Kecamatan Bangil.

Pelaksanaan program madin di SDN Dermo 1 ini praktis dimulai sejak berlakunya PERBUP No 21 Tahun 2016. Program madin ini dilaksanakan pada jam di luar sekolah, yaitu antara pukul 14.00 – 17.00. Siswa SDN Dermo 1 Bangil rata-rata pulang pukul 13.00 WIB. Sehingga mereka dapat mengikuti Program Madin ini pada pukul 15.00 – 17.00 WIB. Menurut kepala sekolah SDN Dermo 1 bahwa 75 persen siswa berasal dari sekitar sekolah, sehingga banyak siswa mengikuti program madin di sekitar SDN Dermo 1 Bangil. Seperti yang disampaikan Ibu Dra. Nugraheni dalam wawancara:

“...Sehingga anak-anak itu di sini sebagian besar sekolah umumnya di sini ikut ngajinya di TPQ di Nurul Fityan sana, ada Madinnya.... Tapi yang sekitar si sini yang Dermo. Karena murid sini kan tidak hanya di wilayah Dermo saja ada yang di Keraton yang penting dia itu ikut Madin di daerahnya masing-masing. Di sini hampir 75 persen di daerah Dermo... “(W/KS/SDN Dermo 1 Bangil /23 Maret 2018).

Kepala Sekolah SDN Dermo 1 menyarankan kepada siswa untuk mengikuti Madin di sekitar tempat tinggal siswa. Agar siswa mendapat pelajaran tambahan tentang agama dan juga mendapat ijazah apabila lulus madin. Sehingga tidak akan kebingungan apabila ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Hal senada juga disampaikan oleh guru agama SDN Dermo 1:

“...mensosialisasikan tentang Madin kepada orangtua bahwa dihimbau anak-anaknya yang belum kan masih ada nggeh yang ndak TPQ ndak Madin masih ada, tapi nggeh ndak banyak. Itu dianjurkan Untuk Segera mendaftarkan putra putrinya di lembaga yang terdekat sesuai tempat tinggal mereka. Tjadi idak harus di sini. Sesuai tempat tinggal mereka. Karena di sini kan dari banyak daerah nggak mungkin menfokuskan pada satu Madin.” (W/GA/SDN Dermo 1 Bangil/31 Maret 2018).

Agar program madin ini dapat berjalan dengan lancar, kepala sekolah SDN Dermo 1 mensosialisasikan kepada walimurid di awal tahun pelajaran dan di beberapa bulan ke depan untuk dapat mengevaluasi program dapat berjalan lancar atau ada hambatan. Seperti yang disampaikan Bu Heni sapaan akrab kepala sekolah SDN Dermo 1 ini dalam wawancaranya:

“..Program ini disampaikan di awal tahun pelajaran baru kita sampaikan program sekolah dan program kelas. 1 tahun 3 kali untuk evaluasi dari program yang tidak tercapai, sehingga walimurid tahu....” (W/KS/SDN Dermo 1 Bangil /23 Maret 2018).

Sependapat dengan pernyataan di atas, guru agama SDN Dermo 1 menyampaikan hal sebagai berikut:

“...di tahun berikutnya bu Heni sudah insyaallah di tahun kemarin sudah merapatkan walimurid dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sosialisasi selain kepentingan tentang sekolah kami itu juga mensosialisasikan tentang Madin kepada orang tua bahwa dihimbau anak-anaknya yang belum kan masih ada nggehuntuk segera mendaftarkan ke Madin terdekat sesuai tempat tinggal mereka...”(W/GA/SDDermo 1/31 Maret 2018).

Adapun Madrasah Diniyah yang banyak diikuti oleh siswa SDN Dermo 1 khususnya kelas VI adalah Nurul Fityan dan Nurul Hidayah. Kedua tempat ini berlokasi di Kelurahan Lumpang Bolong Bangil.

Peran kepala sekolah dan guru dalam mensukseskan suatu program pemerintah daerah sangatlah penting. Mereka adalah sumber utama suatu program dapat berjalan dengan baik dan sukses. Dalam penelitian Acetylena (2013) mengemukakan bahwa kendala dalam implementasi pendidikan karakter di SD Taman Siswa adalah kurang profesionalismenya jiwa among guru. Pada penelitian ini, peneliti mengamati bahwa kepedulian kepala sekolah dan guru agama sangatlah besar terhadap keikutsertaan siswa dalam program madrasah diniyah yang diwajibkan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Pasuruan, dengan terus menyampaikan dalam sosialisai dengan walimurid dan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

4.2.2 Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil

Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil terletak di tengah Kota Bangil. Tepatnya di sebelah timur Alun-alun Bangil. Sekolah ini merupakan sekolah Muhammadiyah yang menjadi salah satu sekolah swasta favourite masyarakat Bangil. Memiliki 13 rombel dengan segudang prestasi baik akademik atau non akademik. Misalnya pada tahun 2017 memperoleh juara III Mipa di tingkat Kecamatan, juara Bahasa Inggris mewakili Jawa Timur ke Tingkat Nasional. Dan juga banyak menggondol emas dan perak pada ajang pencak silat tapak suci se Asia Tenggara.

Pelaksanaan program Madrasah Diniyah di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan di SDN Dermo 1 Bangil. Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil mempunyai kurikulum yang

dinamakan ISMUBA (Keislaman, Kemuhammadiyah, dan Bahasa Arab). Di dalam pelajaran keislaman mencakup: Fiqih, akhlaq, Aqidah, dan Tarikh Islam sehingga menurut kepala sekolah SD Muhammadiyah ini program Madin sudah termasuk dalam pembelajaran di sekolah ini. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan kepala sekolah SD Muhammadiyah Bangil, Bapak Sueb Rizal, S.Ag, S.Pd:

“....Madin itu bagus sama dengan sekolah ini sekolah Muhammadiyah ini yang mengajarkan tentang Al Islam, Kemuhammadiyah, Bahasa Arab, ditambah lagi dengan muatan-muatan yang baru seperti Tamyiz, Tajdied dan adanya Tahfid dan itu sangat selaras dengan Madin. Insyaallah saya menyambut dengan baik....” (W/KS/SD Muhammadiyah Bangil /12 Maret 2018).

Guru agama sekolah inipun mempunyai pendapat yang sama, bahwa kurikulum ISMUBA yang merupakan ciri dari SD Muhammadiyah sudah mencakup pelajaran yang ada di madrasah diniyah. Seperti pernyataan Bapak Abdul latif Zen, S.PdI dalam wawancaranya:

“...tapi sebenarnya di sekolah kita ada program seperti Madin, tapi namanya bukan namanya madin. Di sekolah itu ada namanya ISMUBA. Sedangkan program Ismuba itu berkembang dengan adanya metode tamyiz. Di mana Tamyiz itu mengembangkan ilmu belajar Nahwu Shorof yang dikemas dengan sangat mengasyikkan. Sedangkan materi yang ada dalam Tamyiz itu sudah inklut dengan Madin yang ada artinya di sana tujuannya bisa membaca kitab kuning, Nah itu untuk yang bisa membaca kitab kuning. Selain itu, ada yang namanya Al Islam itu sudah tentang berkaitan dengan keagamaan, di sana ada Aqidah, Akhlak, ada Fiqih, Tarekh...secara garis besar sekolah kita itu sudah ada yang namanya program seperti Madin.” (O/GA/SD Muhammadiyah Bangil/19 Maret 2018).

Hasil observasi dan studi dokumen ditemukan dokumen raport yang berisikan mata pelajaran ISMUBA dan ijasah ISMUBA bagi siswa Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil yang telah menyelesaikan materi tersebut di kelas VI. (D3/RDIISMUBA) (Terlampir)

Pada tahun pelajaran 2018/2019, Kepala Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil melalui Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN) mengurus penyelenggaraan Madin. Tetapi belum bisa mendapatkan legalitas pendirian sehingga pihak sekolah memberikan saran kepada siswa agar ikut Madrasah Diniyah di lingkungan sekitar tempat tinggal siswa untuk memenuhi program wajib belajar Madin. Seperti yang disampaikan kepala sekolah dalam wawancara:

“...Kalau benar-benar SMPnya menerapkan PP eh Peraturan Bupati itu tentang Madin itu, kalau sekolah ini belum siap dan itu menjadi sebuah keharusan yang harus ada keterangan keterangan Madin, kita akan meminta surat keterangan Madin terdekat. Misalnya Madin yang dikelola oleh Haji Syaiful Islam, tetangga saya sendiri ... ke depan kalau itu adanya kita akan menyelenggarakan Madin sendiri.... ” (W/KS/SDKMB/13 Maret 2018).

Hal senada disampaikan oleh guru agama Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil untuk mengatasi keresahan walimurid berkenaan dengan kebijakan wajib belajar madrasah diniyah ini:

“Kami dari pihak sekolah melalui Majelis kami di tingkat Kecamatan Bangil akan mengusahakan Ijasah Madin untuk siswa kelas VI yang akan lulus. Karena Ijasah tersebut dibutuhkan untuk masuk ke jenjang sekolah lanjutan utamanya SMP Negeri di Bangil dan wilayah kabupaten Pasuruan. Selain itu, siswa juga bisa mengikuti Madin di lokasi tempat tinggal siswa.” (W/GA/SD Muhammadiyah bangil / 19 Maret 2018).

4.2.3 Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah di SDS Roudhotul Ulum Bangil

Sekolah Dasar Swasta Roudhotul Ulum terletak di Jalan Gurami No 226 A Kauman Bangil. SD Raoudotul Ulum salah satu SD yang bermadzab Syafi'i yang paling diminati oleh masyarakat Bangil. Banyak program yang ditawarkan sekolah ini salah satunya pendidikan agama yang mengacu pada pendidikan pesantren. SD RDU ini memiliki banyak prestasi, diantaranya juara II lomba MIPA se Kecamatan Bangil.

Pelaksanaan program Madin di SDS Roudotul Ulum Bangil tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil. SD RDU ini juga memiliki kurikulum khusus pendidikan agama yang mencakup Fiqih, hadits, Akhlak, aqidah, Bahasa Arab, bahkan lebih dalam yaitu mengajarkan Sharaf dan khot. Tetapi legalitas dari Kantor Kementrian Agama adalah syarat mutlak untuk dapat menerbitkan ijasah madin untuk para siswa utamanya siswa kelas VI. Kepala sekolah SDS Roudotul Ulum Bangil menjelaskan dengan gamblang tentang pelaksanaan Kebijakan madin ini di sekolahnya dalam wawancara sebagai berikut:

“...sedangkan sekolah kita ya nun sewu sekolah apa namanya sekolah ya diniyah sekolah menggabungkan antara kurikulum umum, kemenag, serta kurikulum pondok pesantren. Ini juga sejak dulu. Apa namanya program kita sudah seperti itu program. Nah.. karena adanya Perbup ini menguatkan kami. Artinya kami punya dasar lebih kuat untuk memberikan

landasan pelajaran umum dan pendidikan agama. ” (W/KS/SD RDU Bangil/26 Februari 2018).

Hal yang sama juga disampaikan oleh guru agama SDS Roudotul Ulum Bangil, Bapak Khoirul Anam, S.PdI tentang pelaksanaan Madin di SDS Roudotul Ulum:

“...di sekolah kita anjurkan anak-anak sudah kalau bisa yang habis dari TPQ dari yang sudah TPQ lulus langsung ke Madin. Madinnya memang tidak ditentukan terserah menurut mereka mana yang lebih dekat dengan rumahnya sehingga tidak sampai mengganggu kegiatan yang di luar sekolah juga. Kalau di dekat sini kan khawatirnya jaraknya terlalu jauh. Yang biasanya anak-anak itu di data yang ngaji siapa....”(O/GA/SDS RDU/27 Februari 2018).

Hasil observasi dan studi dokumen ditemukan dokumen Raport yang berisikan mata pelajaran agama di SD Roudotul Ulum yang dapat dikategorikan sama dengan materi yang diajarkan di madrasah diniyah. (D4/RSDSRU) (Terlampir)

SD Roudotul Ulum Bangil memiliki program khusus seperti pada SD Muhammadiyah Bangil. Karena merupakan SD Islam yang mempunyai ciri khas keislaman yang kuat, maka di sekolah ini menawarkan muatan agama yang lebih banyak dari sekolah lain, misalnya Khot, Imla', Qowaid, Fiqih, Huruf Pego, dll. Materi ini sebenarnya sudah melebihi materi yang diajarkan di Madin. Sehingga sekolah SD RDU ini sebetulnya telah menerapkan program madin walaupun belum mendapatkan legalitasnya.

4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Madrasah Diniyah dalam Memperkuat Karakter Siswa SD di Bangil Pasuruan

4.3.1 Faktor pendukung

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Madin ini adalah pihak Pemerintahan Kabupaten Pasuruan dalam hal ini adalah Bupati Pasuruan. Kantor Kementrian Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Mereka berupaya keras untuk terus mensosialisasikan program madin ini agar masyarakat Kabupaten Pasuruan mengetahui program Madin dan diharapkan tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Seperti yang disampaikan oleh kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Bapak Iswahyudi, M.Pd:

“...Sosialisasi Madin itu sudah dilaksanakan. Di situ ada team ya, teamnya itu dari Kemenag, dari Dinas, dari Dewan Pendidikan, dari Ma'arif, dan dari

masyarakat pesantren. Dan itu sudah dilakukan sosialisasi melalui Kecamatan, melalui desa, dengan bergiliran. Sekarang sudah hampir lanchlah artinya sudah fahamlah masyarakat tentang wajib Madin, tinggal bagaimana kita meningkatkan kualitasnya, efektivitas kegiatan di lapangan itu ajeg apa tidak...”(W/KDP/Dinas Pendidikan Kab.Pas/16 Maret 2018)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Kemenag Kabupaten Pasuruan dalam wawancaranya:

“...ada kegiatan sosialisasi tahun kemarin 2017, bahwa masyarakat harus tahu bahwa ada kebijakan yang diikuti oleh masyarakat dan perlu dijalankan perkecamatan itu, ada petugas khusus yang diminta untuk menyampaikan itu", kemudian disisi yang lain pada tahun 2018 ini meningkat, tidak hanya pada aspek sosialisasi, tapi membuat proto type...”(W/KKA/Kemenag Kab. Pas/13 Maret 2018).

Selain itu, pendirian Madrasah Diniyah diberi support berupa dana untuk pembangunan bagi penyelenggara madin yang telah berdiri dan juga yang baru berdiri. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dalam wawancaranya:

“...Tahun 2016 Pemerintah sudah mulai menambah bantuan-bantuan yang berkaitan dengan BOS Madin. Karena Bos Madin itu ditopang oleh Provinsi dan APBD. Provinsi dan APBD. Jadi kalau Provinsi itu kasi 15 milyar APBD kasi 15 Milyar...”(W/KDP/Dinas Pendidikan Kab.Pas/16 Maret 2018)

4.3.2 Faktor Penghambat

Program wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan belum terlaksana secara maksimal di tahun pertama. Hampir seluruh sekolah Di Kabupaten Pasuruan belum bisa menerapkan Kebijakan ini, sehingga terkesan Kebijakan ini agak sedikit dipaksakan. Kemudian di tahun kedua, dalam implementasinya mulai tertata, hampir semua sekolah uatamanya SD/MI di Bangil menerapkan program ini. Walaupun ada beberapa kendala yaitu berupa hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun faktor penghambat tersebut adalah:

- 1). Beberapa sekolah yang kami teliti masih belum mempunya dokumen yang berupa PERBUP NO 21 Tahun 2016 dan juga Juknis dari PERBUP tersebut.
- 2) Sosialisasi kebijakan Madin belum terlaksana secara maksimal. Karena sosialisasi program ini tidak secara merata dilakukan di seluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Pasuruan. Sosialisasi hanya sekedar dari kepala sekolah kemudian diteruskan kepada guru agama dan guru lainnya. Hal ini seperti yang disampaikan kepala sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil:

“...saya pernah mengikuti beberapa bulan yang lalu ya diselenggarakan di ee.. mana... pendopo Kecamatan Bangil. Ternyata tidak saya saja, tidak kepala sekolah SD saja, SMP pun juga hadir, SMA pun juga hadir waktu itu. ...Dan apa namanya saya rasa sudah disosialisasi. Tapi memang tidak cukup sosialisasi itu, mestinya ada ini lo yang penting. Dari pihak penggagas ini ee.. lebih inten datang ke sekolah-sekolah mestinya untuk menjelaskan itu karena ..., seandainya pihak dari Kemenag punya program turun atau turba istilah ke sekolah sekolah, maka Peraturan Bupati No 21 tahun 2016 itu akan disambut dengan baik...” (W/KS/SD Muhammadiyah Bangil/ 13 Maret 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh kepala sekolah RDU Bangil:

“...Sosialisasi dari apa namanya...dari Kemenag, atau dari Dinas ataupun dari Bupati sangat minim. Memang nyatanya minim faktanya minim.. Karena kita sekali diundang. Itu kita mekso pada UPT untuk bisa hadir di sana, sedangkan undangannya terbatas, tidak seluruhnya. La itu yang kita apa namanya kita kurang memperoleh informasi lebih banyak lebih dalam ...”(W/KS/SDSRDU Bangil/26 Februari 2018).

3). Legalitas pendirian Madin. Madrasah Diniyah cukup banyak yang sudah berdiri di Kabupaten Pasuruan. Tetapi sebagian besar dari Madin tersebut belum mempunyai ijin operasional. Sehingga menjadi penghambat penyelenggara madin tidak dapat mengeluarkan Ijasah sebagai syarat masuk ke jenjang sekolah formal selanjutnya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Kepala Kemenag, Bapak Dr. Asadul Anam, M.PdI. dalam wawancaranya:

“...Dari kelembagaan Madin ini, kami meminta kepada masyarakat yang sekarang jumlahnya 1391 lembaga itu, itu benar-benar sudah tercatat di kami. ...Sehingga mereka yang disampaikan ibu tadi. Benar benar Madin yang sudah legal. Bisa jadi yang disampaikan tadi belum terdaftar, bisa jadi...”(W/KKA/Kemenag Kab.Pas/ 13 Maret 2018)

Hal ini cukup membuat resah orang tua ketika akan mendaftarkan anaknya untuk masuk ke sekolah Negeri di Kabupaten Pasuruan. Siswa tersebut harus mempunyai Ijasah bahwa telah menyelesaikan program madin. Tapi karena madin yang diikuti oleh siswa belum terdaftar, maka siswa tersebut tidak bias menggunakan ijasah yang dikeluarkan oleh penyelenggara Madin. Beberapa orang tua siswa merasa bingung, salah satunya orang tua dari ananda Adam Barron Nuhgraha, Ibu Heny Kusmiyati, wali murid Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil:

“Saya agak bingung dengan program Pemerintah Kabupaten Pasuruan Wajib Belajar Madrasah Diniyah untuk siswa SD. Anak saya setelah lulus SD akan masuk ke SMPN 1 Bangil. Dari persyaratan yang ada, salah

satunya mempunyai Ijasah Madin. Karena dengan adanya bukti Ijasah tersebut, akan mendapat poin 0,5%. Anak saya sejak kelas 1 SD sudah mengikuti Madin di dekat rumah. Tetapi penyelenggara Madin tidak dapat mengeluarkan Ijasah terkendala belum terdaftar di Kemenag.” (W/WM/SD Muhammadiyah Bangil/27 Februari 2018).

4) Tenaga Pendidik. Tenaga pendidik madrasah diniyah di Kabupaten Pasuruan belum memenuhi syarat sebagai pengajar dengan ketentuan sesuai dengan PERBUP No 21 Tahun 2016. Sebagian besar tenaga pendidik madin adalah lulusan SD/SMP dan juga pondok pesantren. Sehingga kemampuan dalam mengatur pembelajaran sangat kurang. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan:

“...Kendalanya itu ya pertama masalah masalah berkaitan dengan guru Madin, ketersediaan guru Madin itu kadang-kadang terbatas. Sebagian lulusan sekolah agama, sebagian lulusan dari pesantren, sebagian lulusan dari pondok. Tenaga pengajarnya ini kadang-kadang perlu ada peningkatan, peningkatan pengetahuan...” (W/KDP/Dinas Pendidikan Kab.Pas/16 Maret 2018).

4.4 Solusi untuk Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam Memperkuat Karakter Siswa SD di Bangil Pasuruan

Faktor penghambat atau permasalahan yang dihadapi dalam implementasi suatu kebijakan, perlu dilakukan tindak lanjut penanganan sehingga masalah-masalah tersebut dapat segera teratasi. Implementasi kebijakan wajib Madin di Kabupaten Pasuruan telah dilakukan beberapa solusi diantaranya sosialisasi yang terus menerus dilakukan pihak Kemenag dan Dinas Kabupaten Pasuruan agar program wajib Madin ini dapat terlaksana dengan baik. Dengan adanya sosialisasi dari pihak pemerintah Kabupaten Pasuruan, diharapkan kepala sekolah dari sekolah-sekolah di Kabupaten Pasuruan berperan aktif untuk memahami program ini. Selain sosialisasi, pemerintah Kabupaten Pasuruan juga menyediakan dana yang cukup besar agar program Madin ini dapat berjalan dengan lancar.

Agar program Madin dapat terlaksana dengan baik, maka pihak pemerintah Kabupaten Pasuruan menginginkan pro aktif dari masyarakat untuk mendukung penuh program ini, utamanya para kepala sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA pro aktif ikut serta dalam kegiatan sosialisasi dan mempunyai dokumen

berupa PERBUP No 21 Tahun 2016 juga juknis pelaksanaan program madin ini. Sehingga masyarakat benar-benar paham akan program ini dan melaksanakan dengan baik.

5. Pembahasan

5.1 Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam Memperkuat Karakter Siswa SD di Bangil Pasuruan

Pembahasan Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam Memperkuat karakter Siswa di Bangil Pasuruan, meliputi implementasi, faktor pendukung dan penghambat, serta solusi yang digunakan dalam menghadapi hambatan tersebut. Hasil kajian tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

Implementasi Kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan ajaran-ajaran agama Islam secara baik dan benar. Hal ini sejalan dengan penelitian (Sultan et al., 2016) bahwa Madrasah Diniyah bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam. Lebih dalam lagi dengan adanya program ini, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menginginkan para pelajar dapat mendalami ilmu-ilmu agama secara menyeluruh yang mencakup tentang Qur'an Hadist, Fiqih, Aqidah, Akhlak, Bahasa Arab, serta Tarikh Islam. Penelitian (Makmun, 2014) menyatakan bahwa dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia, diyakini bahwa nilai dan karakter yang secara legal formal dirumuskan sebagai fungsi dan tujuan pendidikan nasional, harus dimiliki peserta didik agar mampu menghadapi tantangan hidup saat ini dan di masa mendatang.

Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah harus diikuti peserta didik jenjang pendidikan dasar formal yang beragama Islam dilaksanakan tahun pelajaran 2016/2017. Pelaksanaan Program ini diselenggarakan pada Madrasah Diniyah yang lokasinya berada di sekitar tempat tinggal peserta didik. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian (Istiyani, 2017) yang menyatakan bahwa setelah mengikuti kegiatan belajar di sekolah, siswa diharapkan mengikuti layanan MDT (Madrasah Diniyah Takmiliyah) yang lembaga MDTnya memang di sekolah

itu sendiri. Sehingga siswa tetap terus belajar. Penyelenggara pendidikan Madrasah Diniyah ini harus telah terdaftar di Kantor Kementrian Agama. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara bertahap, jika di lokasi tempat tinggal peserta didik dan/atau di sekitar satuan pendidikan formal belum ada Madrasah Diniyah, maka segera di daerah tersebut diselenggarakan madin. Pembelajaran madin ini dimulai minimal pukul 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB atau waktu yang lain dengan durasi minimal 4 x 30 menit (PERBUP No 21 Tahun 2016).

Program Wajib Madin ini telah dilaksanakan oleh seluruh sekolah dasar di Bangil dengan model megarahkan siswa mengikuti Madrasah Diniyah di sekitar tempat tinggal siswa, apabila sekolah tersebut belum memiliki Madin sendiri atau kerjasama dengan Madin tertentu. Hal ini harus dilakukan oleh kepala sekolah SD di Bangil agar siswa yang lulus dari sekolah tersebut mempunyai ijazah Madin atau memiliki surat keterangan masih mengikuti Madin. Ijazah atau surat keterangan tersebut diperlukan sebagai syarat masuk ke jenjang selanjutnya. (Sultan et al., 2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sesuai Perda Kota Serang I/2010 tentang wajib belajar Madrasah Diniyah wajib diikuti oleh pelajar berusia 6 sampai 12 tahun sebagai syarat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi peserta didik harus membuktikan dengan surat tanda tamat belajar Madrasah Diniyah, dalam hal ini syahadah atau sertifikat diniyah.

Di beberapa sekolah seperti Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil dan SD Roudhotul Ulum Bangil, mempunyai materi khusus yang menjadi ikon dari masing-masing sekolah. Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil memiliki materi ISMUBA (Keislaman, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab) yang kemudian berkembang dengan adanya materi Tahfidz, Tajdied, dan Tamyiz. Begitu juga yang terjadi pada SD Roudhotul Ulum. SD ini memiliki materi khusus yang juga menjadi ikon sekolah tersebut untuk menarik minat orang tua untuk masuk ke sekolah ini. Materi tersebut adalah Imla', Khot, Qowaid, dsb yang merupakan pelajaran di pondok pesantren.

Dari fenomena tersebut, Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil dan SD RDU Bangil sudah memenuhi kriteria Madrasah Diniyah. Tetapi terkendala pada legalitas yang harus dimiliki untuk keabsahan penerbitan ijazah atau surat keterangan dari Kementrian Agama Kabupaten Pasuruan. Karena dalam PERBUP

No 21 Tahun 2016 dijelaskan bahwa ijasah/raport dan/atau surat keterangan dikeluarkan oleh kepala Madrasah Diniyah yang sudah mendapat ijin operasional dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Ijasah ini menjadi salah satu syarat penerimaan masuk lembaga pendidikan bagi calon peserta didik yang beragama Islam pada masing-masing jenjang. Kemudian secara tertib dan periodik, pengelola Madrasah Diniyah harus melaporkan pelaksanaan hasil pendidikan kepada Kantor Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama dengan menggunakan format laporan yang sudah ditentukan.

Dalam pelaksanaan program Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan ini, ada satu hal yang sangat menarik yaitu penolakan dari FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah) dengan berlakunya *fullday school* yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Muhadjir Effendi. Apabila dilihat dari substansi pendidikan Madrasah Diniyah yaitu untuk membentuk karakter siswa, berarti berlakunya Program Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan dapat dikaitkan dengan *fullday school* karena pendidikan ini berlangsung dari pagi hingga sore hari. Walaupun ada jarak di antara waktu tersebut. Dan banyak juga sekolah-sekolah dasar swasta yang telah menggabungkan pendidikan formal yang banyak mengajarkan ilmu umum dengan pendidikan Madrasah Diniyah yaitu mengajarkan materi-materi keagamaan dalam satu waktu.

Istiyani, 2017 dalam penelitiannya menyampaikan bahwa eksistensi Madin dalam entitas kelembagaan pendidikan agama Islam di era sekarang terusik dengan munculnya kebijakan *full day school* yang dikeluarkan Kemendikbud. Masyarakat penggagas, pengelola, dan ulama merasa keberatan dengan munculnya kebijakan FDS. Karena Madin adalah jenis Madrasah Diniyah Takmiliyah (diniyah non formal) dengan kegiatan belajarnya di waktu siang hari setelah siswa pulang sekolah.

Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam memperkuat karakter siswa ini dapat terlihat pada pembiasaan yang diberikan guru pada siswa dalam pembelajaran di Madin. Siswa Madin selalu diajak untuk sholat tepat waktu, ditambah dengan sholat sunah, berbuat jujur, sopan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan agama. Guru membimbing siswa dengan telaten, para

guru/ustadz dan ustadzah mengajar dengan model pengajaran di pesantren yaitu dengan menjadikan guru sebagai figur dan pendekatan personal. Selain itu, karakter siswa dapat dilihat dari nilai pendidikan agama yang diperoleh siswa yang mengikuti madin lebih tinggi dibanding siswa lain yang tidak mengikuti Madrasah Diniyah. Acetylena (2016) menyatakan bahwa jiwa among guru adalah bagian penting dalam penanaman karakter siswa. Tanpa hal tersebut pendidikan karakter dan penanaman dan pembiasaan nilai-nilai kebaikan tidak akan terwujud.

Pendidik Madrasah Diniyah berijazah minimal Madrasah Diniyah wustho dan/atau mempunyai kompetensi dalam bidang pelajaran diniyah. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Madrasah Diniyah yang dibuat oleh setiap satuan pendidikan dengan mengacu pada standart minimal kurikulum Madrasah Diniyah Kabupaten Pasuruan yang telah ditetapkan oleh tim pengembang kurikulum diniyah. Sedangkan penilaian hasil belajar bagi siswa/santri dapat dilakukan melalui penilaian harian/mingguan dilakukan oleh guru main, ulangan umum yang merupakan penilaian prestasi belajar secara berkala setiap semester, penyelenggaraannya dilaksanakan secara kolektif oleh suatu kepanitiaan di tingkat Kecamatan dari unsur KKMD, dan evaluasi tahap akhir/ujian akhir madin dilakukan terhadap siswa pada kelas akhir/tertinggi pada akhir tahun pelajaran oleh suatu kepanitiaan di tingkat Kabupaten.

Pembiayaan penyelenggaraan program Madin ini secara keseluruhan menjadi tanggung jawab pengelola Madrasah Diniyah, orang tua/wali murid, masyarakat, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah (APBD). Sebagai lembaga pendidikan yang ikut serta menyelenggarakan pendidikan non formal berhak menerima bantuan Dana dari pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Implementasi Wajib Belajar Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan ini belum dapat berjalan dengan lancar disebabkan sumber daya manusia pada tataran pelaksana yang kurang memahami program pemerintah tersebut, karena sumber daya termasuk salah satu faktor yang sangat penting untuk kesuksesan suatu implementasi. Pada teori implementasi yang dijabarkan oleh Edward III bahwa implementasi akan berjalan dengan baik apabila empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi dapat saling berkaitan satu dengan yang lain. Sumberdaya pelaksana dari implementasi kebijakan Madin masih belum

memahami esensi dari PERBUP No 21 ini, sehingga dalam tataran implementasinya masih kurang berjalan dengan baik. Agar dapat terus berjalan, maka komunikasi dari pihak pemerintahan kepada sekolah-sekolah harus terus dilakukan untuk mendapatkan hasil implementasi sesuai dengan target.

5.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam Memperkuat Karakter Siswa SD di Bangil Pasuruan

Penerapan Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah ini tidak semudah seperti yang direncanakan. Kurang efektifnya sosialisasi/komunikasi antar pemangku kebijakan dan masyarakat maka pelaksanaan program madin ini akan mendapat kesulitan. Beberapa sekolah masih belum memiliki dokumen kebijakan wajib Madin ini dan Minim informasi tentang program ini juga masih kami dapati di beberapa sekolah. Sehingga dalam pelaksanaan program Madin ini masih belum terlaksana dengan baik. Tetapi usaha dari pemerintah Kabupaten Pasuruan masih terus melakukan sosialisasi sehingga program ini bias berjalan dengan baik.

Legalitas sebagai Madrasah Diniyah masih belum dimiliki oleh sebagian besar madin yang sudah berdiri lama di sekitar Kabupaten Pasuruan. Hal ini membuat implementasi kebijakan wajib Madin kurang dapat berjalan dengan lancar. Sehingga pada tahun pelajaran baru 2017/2018 dalam penerimaan siswa baru sekolah lanjutan/SMP, ijasah Madin yang harus disertakan siswa sebagai syarat masuk SMP Negeri di sekitar Kabupaten Pasuruan diganti dengan surat keterangan belum mengikuti Madin atau surat keterangan sedang mengikuti madin. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi siswa dari SD yang belum mengikuti Madin dan akan diikutkan program madin di SMP.

Segala upaya telah dilakukan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan dalam mensukseskan program pemerintah ini diantaranya terus melakukan sosialisasi tentang program Madin pada masyarakat khususnya sekolah-sekolah di Kabupaten Pasuruan. Selain itu, pemerintah juga meminta pro aktif dari pihak sekolah dan masyarakat dalam mendukung program ini sehingga dapat terlaksana dengan baik.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh dari beberapa sekolah dasar di Bangil Pasuruan dalam Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam Memperkuat Karakter Siswa SD di Bangil Pasuruan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah di Bangil Pasuruan dilakukan secara bertahap. Beberapa sekolah bekerjasama dengan Madrasah Diniyah di sekitar tempat tinggal siswa yang mempunyai legalitas dari Kemenag Kabupaten Pasuruan. Pelaksanaan Madrasah Diniyah ini dilakukan sepulang sekolah sekitar pukul 14.00 – 16.00 WIB.
2. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendukung Program Wajib Madin ini dengan pemberian Dana dan juga sosialisasi yang terus menerus di 24 Kecamatan se Kabupaten Pasuruan. Pemetaan prioritas dibagi dalam beberapa tahapan agar dapat tercapai dengan maksimal. Faktor penghambat dalam kebijakan ini adalah kurang pro aktifnya beberapa lembaga pendidikan khususnya sekolah dasar dalam mensukseskan wajib madin. Hal ini terbukti dengan sedikitnya lembaga pendidikan yang mempunyai dokumen PERBUP No 21 Tahun 2016 dan Petunjuk Teknis kebijakan ini. Serta beberapa penyelenggara Madin di Kabupaten Pasuruan belum mempunyai izin pendirian. Sehingga Madrasah Diniyah ini belum bisa mengeluarkan ijazah Madin bagi siswa sebagai syarat masuk ke jenjang sekolah lanjutan.
3. Solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi di lapangan, pihak pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dan Kemenag harus terus melakukan sosialisasi pada masyarakat dan sekolah-sekolah, agar kebijakan ini dapat terealisasi dengan baik dan terlaksana dengan maksimal.

7. Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut maka perlu disertakan saran yang sangat bermanfaat dan dapat membantu terlaksananya Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah yang digagas oleh Pemerintahan Kabupaten Pasuruan khususnya Bupati Pasuruan pada

tahun pelajaran 2016/2017 adalah program yang sangat baik untuk pembinaan akhlak/karakter siswa pada sekolah non formal. Penetapan kebijakan ini harus disertai dengan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah-sekolah formal jenjang SD/MI juga terus melakukan pembenahan agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

2. Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam hal ini Kementrian Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan harus berkomitmen kuat untuk terus mengawal PERBUP No 21 tahun 2016 agar Kabupaten Pasuruan dapat kembali menjadi Kabupaten yang mendapat sebutan “Kota Santri” dengan kesantunan dan kebaikan akhlak yang dimiliki oleh masyarakatnya.
3. Pro aktif dari seluruh sekolah dari jenjang SD/MI di Kabupaten Pasuruan sangatlah penting untuk memperlancar keberhasilan implementasi kebijakan ini. Dengan terus berkomunikasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan kebijakan wajib Madin di level pelaksana/sekolah.

Rujukan

- Abdillah. (2010). Merancang Perpustakaan Islam yang Menarik dengan Mengintegrasikan Kandungan Prinsip QS. Al Alaq 1-5. *Thesis. Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Abu, L., Mokht, ar, M., Hassan, Z., Zakiah Darmanita Suhan, S., Abu Student, L., ... Zakiah Darmanita Suhan Student Ph, S. (2015). How to Develop Character Education of Madrassa Students in Indonesia. *Journal of Education and Learning*, 9(1), 79–86.
- Acetylena, S. (2013). Analisis Kebijakan Pendidikan Karakter di Perguruan Taman Siswa Kecamatan Turen Kabupaten Malang. *Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 1(1), 55–61.
- Agama, D. Pedoman Administrasi Madrasah Diniyah (2003). Republik Indonesia Jakarta: Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, Dirjen Kelembagaan Agama Islam.
- Akhirudin. (2015). Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara. *Tarbiyah*, 1(1).
- Amiruddin. (2011). Penyelenggaraan Madrasah Diniyah di Kota Samarinda Povinsi Kalimantan timur. *Al Qalam*, 17(2), 296–305.
- Aziz, H. (2011). *Pendidikan Karakter Berpusat Pada Hati*. Jakarta: PT Al-Mawardi Prima.

- Dun, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Pers.
- Istiyani. (2017). Eksistensi Madrasah Diniyah (MADIN) sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia, 2, 147–165.
- Fattah, N. (2012). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Haningsih, S. (2008). Peran Strategis Pesantren, Madrasah Dan Sekolah Islam Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam: El Tarbawi*, 1(1), 27–39.
- Istiyani, D. (2017). Eksistensi Madrasah Diniyah (MADIN) sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia. *Edukasia Islamika*, 2, 147–165.
- Juliarta, E. (2009). M. I. K. P. J. T. R. P. (2009). *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada.
- Kaimuddin. (2014). Implementasi Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013. *Dinamika Ilmu*, 14(1), 47–64.
- Kosim, M. (2007). Madrasah di Indonesia (Pertumbuhan dan Perkembangan). *Tadris*, 2(1), 42–43.
- Lincoln, & G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. London: Sage Publication.
- Lubis, A. M. (2015). Effective Implementation of the Integrated Islamic Education. *GJAT*, 5(1), 59–68.
- Makmun, H. A. R. (2014). Pembentukan Karakter Berbasis Pendidikan Pesantren : *Cendikia*, 12(2), 212–238.
- Maskur, M. (2017) Eksistensi dan Esensi Pendidikan Madrasah di Indonesia: *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, 4(1), 101–119
- Moleong, L. . (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasir, M. (2015). Kurikulum Madrasah: Studi perbandingan Madrasah di Asia. Nadwa. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(9), 23–31.
- Omebe, C. (2014). Human Resource Management in Education: Issues and Challenges. *Department of Science Education Ebonyi State University*, 7(2), 26–31.
- Paul A, S. (1986). *Theories of the Policy Process*. Westview: Boulder.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Pasuruan.

Peraturan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Organisasi Dinas Pendidikan Bidang Pergurag yang Membidangi: MI, MTs, MA, Madin, dan Pondok Pesantren.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Peraturan Presiden No 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2016 tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah Dan Takhassus Diniyah.

Peraturan Pemerintahan Daerah No 36 Tahun 2007. tentang Baca Tulis Al Qur'an (BTQ) Bagi Peserta Didik yang Beragama Islam.

Radar. (2016). Wajib Belajar Madrasah Diniyah Kabupaten Pasuruan

Ridho., Zainal, S. (2010). Pendidikan di Negara-Negara Anggota Oki: Perbandingan antara Perempuan dan Laki-Laki. *Politeknik Negeri Universitas Sriwijaya Palembang*.

Sa'ud, S., & Makmun, A. S. (2006). *Perencanaan Pendidikan: Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Salahuddin, M. (2013). Reposisi dan eksistensi madrasah salafiyah di era global. *Cendikia*, 11(2), 215–231.

Sirajuddin, I. A. (2014). Mplementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. *Administrasi Publik*, 4(1).

Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan. *Religi. Studi Islam*, 2(6), 148–178.

Sugiono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, N. S. (2012). *Pengembangn Kurikulum Teori Dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda karya.

Sultan, I., Hasanuddin, M., Jend, J., No, S., Serang, K., Abdul, J. K. H., ... Serang, K. (2016). Pelaksanaan Pendidikan Madrasah Diniyah Di Kota Serang, 1.

Supa'at, S. (2014). Model Kebijakan Pendidikan Karakter di Madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1)

Syahr, Z. Ha. A. (2016). Membentuk Madrasah Diniyah Sebagai Alternatif Lembaga Pendidikan Elite Muslim Bagi Masyarakat. *Jurnal Intizar*, 22(2), 393–414.

Tilaar, H. A. R. & R. N. (2012). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang -Undang No 20 (2003). Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Waiganjo W, et al. (2012). Relationship between Strategic Human Resource Management and Firm Performance of Kenya's Corporate. Organizations. *Department of Science Education Ebonyi Stat University, Abakaliki.*

Wasmawati. (2015). Penanaman nilai-nilai agama Islam pada siswa madrasa ibtidaiyah Nurjalin Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap. Purwokerto. *Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN).*

Wibawa, dkk. (1994). K. P. J. I. (1994). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia.

